

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Sokhifatul Mufida, Meike Rizki Damayanti, R. P. (2019). Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Pada Cv. Anugrah Jaya Kab. Bangkalan). *Competence : Journal of Management Studies*, 12(2), 144–166.
<https://doi.org/10.21107/kompetensi.v12i2.4955>
- Arief Rachman Badrudin, Muhammad Hidayat Ginanjar, W. (2020). Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Daring Selama Pandemi Covid 19 Pada Jenjang Sekolah Dasar di Bogor. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(02), 480. <https://doi.org/10.30868/ei.v9i02.909>
- Asrilia Kurniasari, Fitroh Setyo Putro Pribowo, D. A. P. (2020). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (Bdr) Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian*, 6(3), 1–8. <http://journal.unesa.ac.id/index.php/PD>
- Bintari, A., & Pandiangan, L. H. S. (2016). Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Perseroan Terbatas (Pt) Mass Rapid Transit (Mrt) Jakarta Di Provinsi Dki Jakarta. *CosmoGov*, 2(2), 220. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10006>
- Binusian UNS. (2010). Teori Efektivitas Hukum. *Thesis Magister Komunikasi*, 6–21.

Buana, D. R. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa.

SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(3).

<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15082>

Didik Haryadi Santoso, A. S. (2020). *Covid-19 Dalam Ragam Tinjauan Perspektif* (Didik Haryadi Santoso & Awan Santosa (ed.); Juni 2020). MBridge Press.

<http://lppm.mercubuana-yogya.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/BUKU-RAPID-RESEARCH-COVID-UPDATE-1.pdf>

Fadel Machmud, Marthen Kimbal, & F. R. (2017). Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 2(2).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/18136>

Fitriani, D., & Yuningsih, N. Y. (2016). Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Cianjur. *CosmoGov*, 2(2), 330.

<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10007>

Hani Tahliani. (2019). Efektivitas Surat Edaran Bupati Nomor 451/12/32/2/KESRA Tahun 2006 Tentang Zakat Profesi PNS Dalam Pengumpulan Zakat Profesi di Bazda Kabupaten Karawang. *Fakultas Syariah Dan Hukum*, 53(9), 1689–1699.

<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Poltak Partogi Nainggolan. (2020). Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid

- 19). *Parliamentary Review*, II(3).
- Pramesti, D. A. A. I., & Laksana, I. G. N. D. (2020). Implementasi Peraturan Gubernur Bali No. 46 Tahun 2020 Di Desa Batubulan. *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 71–82. <https://doi.org/KW.2020.v10.i01.p06>
- Ryanto, A. (2015). Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.33884/jck.v3i2.961>
- Saidah, D. (2020). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Wabah Covid 19 di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, XII(September), 11.
- Sanjaya, N. (2020). Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(2), 273–290.
- Sintang, D. I. K. (2012). *Implementasi Kebijakan Surat Edaran Bupati Sintang Premium Eceran Tertinggi Bagi Kios Berizin*.
- Syahrin, M. A. (2017). The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), 168. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol1.iss2.41.pp168-178>
- Wardana, M. D. K. (2016). Implementasi Surat Edaran Mendikbud Terhadap Peran Orang Tua Pada Hari Pertama Sekolah. *Pedagogia: Jurnal Pendidikan*, 5(2),

169. <https://doi.org/10.21070/pedagogia.v5i2.248>

Zulkarnain, U. (2017). Analisis kebijakan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kualitas layanan publik daerah. *Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 1–13.